

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Ulum, Ihyaul, 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap keadaan lingkungan sekitar baik fisik maupun nonfisik (Hadi, 2011). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi adalah manfaat atau sumberdaya bagi perusahaan untuk bertahan hidup.

Deegan, Robin dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan didapat jika diperoleh kesamaan antara apa yang diharapkan masyarakat dari perusahaan dan apa yang diinginkan perusahaan dari masyarakat dapat tercapai, sehingga tidak ada klaim dari

masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan eksternal berusaha untuk memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batasan dan norma masyarakat (Michelon dan Parbonetti, 2010).

Ghozali dan Chariri (2007) memberikan dasar pemikiran tentang untuk legitimasi organisasi, organisasi tersebut berusaha menciptakan kesesuaian antara nilai sosial yang melekat dalam kegiatannya dengan norma perilaku dalam sistem sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dari sistem. Selama kedua sistem nilai tersebut sesuai, dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan legitimasi perusahaan. Ketika kurangnya kesesuaian aktual dan potensial antara kedua sistem tersebut, maka ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

2. Teori Keagenan

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Principal adalah pemilik modal untuk membantu membiayai operasional perusahaan, sedangkan manager adalah pelaku kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tentang tanggung jawab sosial untuk tujuan membangun citra perusahaan dan mendapatkan perhatian publik.

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Prinsipal menyerahkan pengelolaan

perusahaan kepada manajemen. Manajer sebagai pihak yang berwenang untuk kegiatan perusahaan dan wajib menyediakan laporan keuangan akan cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan kegunaannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham.

3. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* muncul dari pandangan bahwa organisasi pada dasarnya tidak hanya memikirkan kepentingan organisasi, tetapi organisasi juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan lainnya, diantaranya masyarakat, pemerintah, dan bahkan lingkungan dimana organisasi menjalankan kegiatannya.

Stakeholder penting untuk perusahaan dan sangat berpengaruh dalam menjalankan kegiatan bisnis dan usahanya karena berhubungan dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan luas lingkup operasi perusahaan. Agar kegiatan usaha berjalan dengan lancar, maka diperlukan adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Gozali dan Chariri (2007) berpendapat bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak hanya peduli dengan kepentingan perusahaannya, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*.

4. *Jakarta Islamic Index*

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII adalah salah satu indeks saham di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata untuk jenis saham yang memenuhi kriteria syariah. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara saham syariah dengan saham non syariah, namun saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan dapat dibedakan sesuai kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham. Saham dikatakan sesuai dengan syariah jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang halal dan niat untuk membeli saham tersebut adalah untuk investasi, bukan spekulasi. Tujuan pendirian JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada saham berbasis syariah dan memberikan keuntungan bagi investor dalam menjalankan syariah Islam untuk berinvestasi di bursa efek.

Jakarta Islamic Index juga diharapkan dapat membantu proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi panduan bagi investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi patokan kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal.

5. Konsep *Triple Bottom Line* & Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Ide dalam *sustainability* memiliki tiga dimensi dalam konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh Elkington. Elkington menganggap ini berasal dari pendekatan ilmu manajemen yang dimaksudkan sebagai cara untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (Kuhlman, 2010). *Social Economic Council of Netherland (SER)* (dalam Moon, 2006) menekankan bahwa kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak terbatas pada penciptaan nilai ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan penciptaan nilai pada tiga bidang, mengacu pada *Triple bottom line*. Hal-hal tersebut adalah :

- a. Profit : Dimensi ini mengacu pada penciptaan nilai melalui produksi barang dan jasa dan melalui penciptaan lapangan kerja dan sumber pendapatan.
- b. People: Meliputi berbagai aspek mengenai dampak operasional perusahaan terhadap kehidupan manusia, baik di dalam maupun di luar organisasi, seperti kesehatan dan keselamatan kerja.
- c. Planet: Dimensi ini terkait dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan alam.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility* (Hackston & Milne, 1996) adalah proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan

ekonomi organisasi terhadap kelompok tertentu yang berkepentingan dan terhadap seluruh masyarakat. Tanggung jawab sosial adalah tentang kapasitas pembangunan berkelanjutan, dimana tanggung jawab sosial menghormati perbedaan budaya dan mencari peluang bisnis untuk mengembangkan kemampuan karyawan, masyarakat dan pemerintah.

B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Pengertian masyarakat disini adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Mulyono, 2010). Semakin besar saham yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Agar masyarakat mau berinvestasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan harus memberikan keunggulan dan eksistensi kepada publik. Salah satu caranya adalah dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin tinggi komposisi saham yang dimiliki oleh masyarakat, maka perusahaan dapat melakukan pengungkapan yang luas termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, karena kepercayaan investor dan masyarakat luas

semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan harus memberikan informasi seluas mungkin kepada investor dan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk laporan keuangan saja, namun juga dalam bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Apabila dikaitkan dengan teori *stakeholders* jika perusahaan tidak mempublikasi laporan CSR maka investor akan memberikan sanksi berupa keengganan untuk memiliki saham perusahaan. Keengganan ini akan menyebabkan harga saham perusahaan turun, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Arifur Khan *et al.* (2012), Hadi dan Sabeni (2002), dan Puspitasari (2009), menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan penelitian Santoso (2002), Novita dan Djakman (2008) tidak menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan saham publik dengan pengungkapan CSR. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Pertumbuhan perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Ulfa (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan tingkat pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan penjualan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kesempatan tumbuh yang tinggi diharapkan akan memberikan

profitabilitas yang tinggi di masa depan, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Apabila dikaitkan dengan teori *stakeholders*, informasi pertumbuhan perusahaan menjadi salah satu pertimbangan bagi para investor.

Pada saat pertumbuhan perusahaan meningkat dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan juga meningkat memberikan daya tarik lebih bagi para investor, karena tanggung jawab sosial perusahaan juga menjaga kestabilan dan menghindari perusahaan dari masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan para *stakeholders* di masa yang akan datang. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan mendapat banyak sorotan, sehingga diperkirakan perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan lebih tinggi cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah, dkk (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan ulfa (2009), dan Sari (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

3. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Heinze (1976) dalam Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa profitabilitas adalah faktor yang memberi manajer kebebasan dan fleksibilitas untuk mengungkapkan tanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Artinya semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder dimana perusahaan yang mendapatkan profitabilitas tinggi akan berdampak pada banyaknya pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga akan mensejahterakan pihak-pihak terkait yaitu stakeholder, yang juga dapat memanfaatkan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Falck dan Heblich (2007) mengemukakan bahwa CSR berkontribusi untuk reputasi yang baik dari sebuah perusahaan yang penting untuk mempertahankan keterampilan karyawan. Keterampilan karyawan ini diperlukan untuk keberhasilan operasi bisnis yang akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sari (2012), Sulastini (2007), Nurkhin (2009), Untari (2010), Hackston dan Milne (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berbeda dengan Anggraini, (2006), Sembiring (2005), Puspitasari (2009) Purwanto (2011), Donovan dan Gibson (2000) yang menemukan hasil penelitian pengaruh profitabilitas yang tidak signifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

4. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Menurut Sembiring (2005), semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka akan lebih mudah untuk mengontrol CEO dan pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dimana dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memantau tindakan manajemen puncak. Terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap manajemen juga akan lebih besar untuk mengungkapkannya. Dalam penelitian Sembiring (2005), ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Chariri (2011), Sembiring (2005), Nurkhin (2009), Yuniarti (2003), Sitepu dan Hasan (2008) telah melakukan penelitian hubungan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hasilnya bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian dari Djuitaningsih (2012), Febrianti (2008), Wulandari (2009), Arief dan Kurnia (2008), Cahyaningsih dan Venti (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ini berarti bahwa besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak dapat menjamin mekanisme pengawasan yang lebih baik dan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Besarnya komite audit dalam perusahaan sebagai salah satu mekanisme dalam GCG, diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen agar lebih baik dalam mewujudkan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan, sehingga keinginan para *stakeholder* untuk melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengungkapkannya ke publik dapat terjamin. Komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaporan dan pertanggungjawaban langsung kepada komisaris. Komite audit diharuskan untuk bertindak secara independen. Hal ini karena komite audit merupakan jembatan antara auditor eksternal dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani fungsi pengawasan dewan komisaris dengan auditor internal.

Pada pelaksanaan *corporate governance*, teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan agar tidak terjadi

perselisihan antar pihak yang memiliki kepentingan. Padahal, komite audit diwajibkan untuk bekerja dalam mengawasi kinerja manajemen dalam membuat pengungkapan secara akurat, lengkap, jelas dan teliti. Selain itu juga memberikan bukti bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Penelitian Ratnasari (2011), Widiyanto (2011), dan Luthfia (2012) menemukan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih dan Marsyah (2012) menemukan hasil bahwa ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₅: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

C. Model Penelitian

